



PENGUKURAN RENCANA AKSI



2022

**KECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE**

PENGUKURAN RENCANA AKSI KECAMATAN DUA BOCCOE TAHUN 2022

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2021				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KEBERHASILAN	KEGAGALAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1 (%)	TW 2 (%)	TW 3 (%)	TW 4 (%)	TW 1 (%)	TW 2 (%)	TW 3 (%)	TW 4 (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dua Bocoe	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	Persentase	100	11,113,025,510	2,204,152,352	3,043,212,644	2,865,536,878	2,951,369,039	25	25	25	25	19.83	27.38	25.79	26.56	25	25	25	25	Adanya upaya dalam menyelesaikan laporan urusan pemerintahan daerah	Belum optimalnya kualitas kegiatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	adanya Peningkatan Kinerja dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	Meningkatnya kualitas kegiatan penunjang urusan umum khususnya pada penyusunan laporan capaian kinerja	Kurangnya Kualitas SDM dalam Melaksanakan pengkoordinasian urusan pemerintah daerah	Tingkatkan Kinerja Pelayanan sesuai SOP
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai standar Pelayanan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase	100	22,560,670	9,012,380	3,203,200	7,545,090	2,800,000	100	0	0	0	39.95	14.20	33.44	12.41098	100	0	0	0	Adanya upaya untuk menyelesaikan laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Masyarakat bisa meningkatkan hasil realisasi usulna-usulan masyarakat melalui kegiatan musrenbang	Masih terdapatnya usulna-usulan masyarakat yang belum bisa dilaksanakan pada tahun sebelumnya	Penyesuaian waktu dalam melakukan pelaporan perencanaan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	2	10,079,400	3,162,200	2,290,900	1,826,300	2,800,000	100	0	0	0	31.37	22.73	18.12	27.78	5,000	0	0	0	Adanya komitmen Aset dalam menyiapkan SSH secara tepat waktu	Usulan Perencanaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah	adanya Ketersediaan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Program dan Keuangan	Dokumen perencanaan sudah bisa di update tepat waktu	keterlambatan penyediaan SSH oleh Aset	Kordinasi dengan bagian keuangan Di Daerah masalah SSH	
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2,635,640	1,474,070	0	1,161,570	0	100	0	0	0	55.93	0	44.07	0	10,000	0	0	0	Ketersediaan SSH secara tepat waktu	Seringnya mengubah Satuan Standar Harga sub Kegiatan yang di geser akibat adanya Dana Penanganan Covid 19	adanya Ketersediaan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Program dan Keuangan	Pengimputan RKA di aplikasi SIPD sudah tepat waktu	sering terjadinya pergeseran dana antar sub kegiatan	kejelasan standar harga yang harus ada sebelum melakukan pergeseran Dana	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2,895,220	1,378,560	0	1,516,660	0	100	0	0	0	47.62	0	52.38	0	10,000	0	0	0	Adanya perpanjangan waktu dalam pengimputan pada aplikasi sipd	Keterlambatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dikarenakan waktu yang kurang Efisien	Memfaatkan Waktu Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tepat waktu	Sub Bagian Program dan Keuangan	Perencanaan RKA didukung oleh perpanjangan waktu dalam pengimputan aplikasi SIPD	sering terjadinya pergeseran dana antar sub kegiatan	pemfaatan waktu harus diperimbangkan dengan baik untuk penyusunan Perubahan RKA	
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	2,823,490	917,980	668,500	1,237,010	0	100	0	0	0	32.51	23.68	43.81	0	10,000	0	0	0	Tersedianya data dalam penyusunan laporan Capaian kinerja	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Kinerja SKPD masih Terkendala oleh Kurangnya SDM Sehingga Penyusunan Laporan sering tidak tepat waktu	Di adakan Bimbingan Teknis bagi Penyusun Laporan LPPD dan LKJIP	Sub Bagian Program dan Keuangan	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja	Kurangnya pemahaman tentang penyediaan APIDANCE dalam Pengumpulan data	menemui orang-orang yang berkompeten dalam hal Penyusunan LPPD&LKJIP	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	4,126,920	2,079,570	243,800	1,803,550	0	100	0	0	0	50.39	5.91	43.70	0	10,000	0	0	0	Adanya upaya dalam melengkapi dan memperbaiki laporan evaluasi kinerja pegawai	Kurangnya Dokumen penunjang dalam hal penyelesaian Laporan evaluasi Kinerja Pegawai	Adanya dokumen pendukung untuk menjadi bahan penyelesaian Laporan Pegawai	Sub Bagian Program dan Keuangan	Penyediaan dokumen laporan evaluasi kinerja sudah bisa di update tepat waktu	Masih kurangnya data pendukung yang memadai	agar kesiapan Dokumen pendukung memadai	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase	100	10,714,828,750	2,130,264,933	2,953,094,785	2,794,152,043	2,789,062,811	25	25	25	25	19.88	27.56	26.08	26.03	25	25	25	25	Adanya upaya Bidang Keuangan daerah dalam menisirkan pagu anggaran tiap tahunnya	Terjadinya perubahan pagu anggaran yang signifikan	Adanya kesesuaian pagu anggaran mengikti anggaran perubahan daerah	Sekretariat	Terbayarnya gaji/upah setiap ASN sesuai tugas dan tugasnya	Masih terdapatnya kekurangan gaji ASN yang belum dibayarkan tepat waktu	Kordinasi dengan Bagian Keuangan tentang Perubahan Pagu	
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	10,714,828,750	2,130,264,933	2,953,094,785	2,794,152,043	2,789,062,811	25	25	25	25	19.88	27.56	26.08	26.03	2,500	13	2,500	2,500	Kelebihan pagu anggaran selalu dikembalikan setiap akhir tahun penganggaran	Sering terjadinya kelebihan Pagu anggaran	Di adakan kesesuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi pengembalian dana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Terbayarnya gaji/upah setiap ASN sesuai beban tugasnya	Masih terdapatnya kekurangan gaji ASN yang belum dibayarkan tepat waktu	perhitungan yang matang dalam hal melakukan perencanaan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	persentase	100	5,000,000	5,000,000	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	Adanya upaya dalam Bidang Kepegawaian dalam hal pemenuhan kebutuhan pegawai	Belum optimalnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan pegawai dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat	Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan Kepegawaian	Masih terbatasnya pemenuhan dalam hal peningkatan pemenuhan administrasi kepegawaian	Perlu peningkatan dalam hal peningkatan pemenuhan administrasi kepegawaian	

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan jasa Pelayanan Umum/Administrasi Keuangan selama setahun	OB	336	102,288,000	22,569,900	23,474,100	11,146,600	45,097,400	25	25	25	25	22.07	22.95	10.90	44.09	7	0	7	7	luran jaminan kesehatan bagi tenaga honorer sdh dimasukkan dalam penganggaran	Adanya Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Honorer yang Pembayaran tidak Sesuai di Setiap Bulannya	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Honorer yang Merata Tiap Bulannya	Sub Bagian Program dan Keuangan	Terbayarnya iuran jaminan kesehatan bagi tenaga honorer	Belum adanya ketetapan standar pembayaran iuran jaminan kesehatan	Perlu adanya koordinasi dengan Pihak terkait Ketetapan Standar Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	100	31,391,060	6,673,200	10,943,000	1,400,000	12,298,860	25	25	25	25	21.26	34.86	4.46	39.18	25	0	25	25	Adanya upaya dalam pemeliharaan barang milik daerah	Kurang maksimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah	pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Sekretariat	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	Perlu peninjauan dana dalam pemeliharaan barang milik daerah	Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	26,862,760	4,748,800	9,275,500	1,400,000	11,362,460	25	25	25	25	17.68	34.53	5.21	42.30	625	0	625	625	Adanya pemeliharaan kendaraan secara rutin	Pemeliharaan Kendaraan yang terbatas dengan standar harga yang sudah di tetapkan	peningkatan koordinasi dengan aset terkait biaya pemeliharaan standar biaya pemeliharaan kendaraan kepasad aset	Seksi Pelayanan Umum	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Operasional	Masih kurangnya koordinasi dengan aset terkait biaya pemeliharaan kendaraan	perlu dilakukan koordinasi dengan aset terkait dengan biaya pemeliharaan kendaraan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dirahabilitas	Unit	2	4,528,300	1,924,400	1,667,500	0	936,400	0	100	0	0	42.50	36.82	0	20.68	0	0	0	0	Adanya upaya pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan secara bersama	Kurangan pekerja yang biasa melakukan pemeliharaan Gedung Kantor	Para pekerja yang lebih berkopoten dalam rangka pemeliharaan gedung kantor secara berkala	Seksi Pelayanan Umum	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Tidak adanya pekerja yang bisa melakukan pemeliharaan gedung kantor	Diperlukan pekerja yang lebih dalam rangka pemeliharaan gedung kantor
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase	100	22,891,400	22,891,400	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	Tersedianya SDM dalam melaksanakan pelayanan publik	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	adanya kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan dalam hal pelayanan publik	Sekretariat	Tersedianya SDM dalam melaksanakan pelayanan publik	Masih kurangnya himtek/pelatihan dalam peningkatan mutu SDM	Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan
			koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	persentase	100	22,891,400	22,891,400	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	100	0	100	100	Adanya sop yang mengatur tupoksi pegawai	Kurangnya Koordinasi antar Opd Tekhnis	pembagian kerja Pegawai setiap hari dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan	Sekretariat	Adanya SOP yang mengatur tupoksi pegawai	Perlu diadakan sosialisasi tentang tupoksi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan	agar perlu pembagian kerja dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait	Kegiatan	1	22,891,400	22,891,400	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	10,000	0	0	0	Adanya mekanisme pelaksanaan musrenbang yang terus diperbaharui	Pada saat pelaksanaan Musrenbang terkadang OPD pulang sebelum kegiatan berakhir	perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan sspd OPD yang datang bermusrenbang	Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemerintahan	Pelaksanaan musrenbang setiap tahunnya dapat terlaksana dengan baik	SKPD yang datang bermusrenbang terkadang pulang sebelum acara selesai	perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan sspd OPD yang datang bermusrenbang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase	100	191,899,980	10,870,730	14,790,470	146,926,790	19,308,990	100	0	0	0	5.66	7.71	76.56	10.06	100	0	0	0	Sering diadakan pembinaan pemberdayaan desa oleh kabupaten	Belum terpenuhinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tepat waktu	Kerja sama Tim yang baik sehingga menghasilkan penyediaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Sekretariat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	kurangnya sosialisasi dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	agar perlu kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase	100	15,000,000	3,323,840	7,246,350	4,429,810	0	0	0	0	100	22.16	48.31	29.53	0	0	0	0	100	Adanya pembinaan yang sering diadakan di desa	Belum optimalnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	adanya stekholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa	Sekretariat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	kurangnya sosialisasi dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	agar perlu adanya stekholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	1	15,000,000	3,323,840	7,246,350	4,429,810	0	0	0	0	100	22.16	48.31	29.53	0	0	0	10,000	Adanya FKKS yang selalu mengkomodir pokja desa sehat	Masih Kurangnya Koordinasi antar Desa sehingga Laporan Pokja Desa sering Terlambat yang mempengaruhi Keterlambatan Laporan FKKS	peningkatan Koordinasi dan Sinergitas antar Pokja Desa dan FKKS dalam Hal Penyusunan Laporan	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra Seksi Pemangungan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelaksanaan FKKS dapat berjalan dengan lancar	Perlu adanya pengkoordinasian dan sinergitas antar pokja desa dan FKKS		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase	100	176,899,980	7,546,890	7,544,120	142,496,980	19,308,990	0	100	0	0	4.27	4.26	80.55	10.92	0	0	0	0	Adanya SDM yang memberikan pelayanan publik	belum optimalnya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	SDM yang berkompeten terhadap kegiatan pemberdayaan Desa	Sekretariat	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kurang optimalnya SDM yang ada terhadap kegiatan pemberdayaan	agar dioptimalkan SDM yang ada terhadap kegiatan pemberdayaan
			Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket	1	142,499,980	0	0	142,496,980	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	Tersedianya data dan informasi di kelurahan	Kelurahan belum sepenuhnya memiliki Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kelurahan dalam Melaksanakan	Mengkoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap Kewenangan Kelurahan dalam Pengetolaan anggaran Pembangunan Sarana	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan Seksi Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat dan Desa	Terlaksananya sarana prasarana kelurahan	Adanya Pengurangan dana kelurahan sehingga berpengaruh terhadap pembangunan	agar berkoordinasi dengan Pihak terkait tentang Pembangunan sarana dan Prasarana di Kelurahan

